



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA : ANGGOTA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : BINZIAD KADAFI
- Jabatan** : ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
- NHK** : 794252

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.316.238.250**

- Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/258 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI , HIBAH DENGAN AKTA , Rp. 1.113.668.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 609.830.250
- Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 592.740.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.007.000.000**

- MOBIL, MITSUBISHI ALL NEW PAJERO SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
- MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
- MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX HYBRID Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 612.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **772.775.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **1.224.124.537**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **266.551.299**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **252.082.000**

Sub Total **Rp.** **5.838.771.086**

III. HUTANG **Rp.** **----**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

5.838.771.086

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.